



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

**(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)**

---

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 16 Mei 2024
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membahas perkembangan pelaksanaan upaya penurunan stunting sebagai program nasional 2024: a. Metode pendataan stunting dan analisis terhadap keakuratan serta kecukupan data yang telah terkumpul; b. Kendala dalam proses pendataan stunting dan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi dan cakupan data stunting di seluruh wilayah Indonesia; c. Upaya kolaborasi antar lembaga dan pihak terkait untuk memperkuat sistem pendataan stunting secara berkelanjutan; 2. Membahas perkembangan percepatan pelaksanaan program intervensi spesifik bagi anak stunting tahun 2024.
Ketua Rapat	: 1. Rapat dipimpin oleh : Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI 2. Rapat dilanjutkan oleh : Charles Honoris/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: 1. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, beserta jajaran; 2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), beserta jajaran; 3. 33 dari jumlah 50 Anggota Komisi IX DPR RI.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dibuka pukul 10.15 WIB., maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN RI untuk bersama-sama melakukan upaya yang jelas dan terukur demi meningkatkan capaian percepatan penurunan angka stunting melalui:
  - a. Penetapan definisi dan kriteria stunting yang seragam dan konsisten berdasarkan standar WHO untuk digunakan oleh semua instansi terkait di tingkat nasional dan daerah;
  - b. penyelarasan regulasi untuk implementasi program stunting baik di tingkat pusat dan daerah baik melalui mekanisme Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) ataupun dengan peraturan perundangan lainnya;
  - c. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga terkait dalam penggunaan dan penerapan indikator stunting yang seragam seperti antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sosial RI;
  - d. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis data real-time, sehingga memudahkan pelaporan dan analisis kondisi stunting di berbagai wilayah, termasuk penggunaan teknologi dan inovasi;
  - e. Penguatan kompetensi kader Posyandu dan tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sehingga mampu menggunakan dan menginterpretasikan indikator stunting yang telah diselaraskan secara efektif; dan
  - f. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara mandiri menggunakan indikator stunting yang seragam.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN RI untuk segera melakukan penyelarasan pendataan stunting pada Survey Kesehatan Indonesia (SKI) dan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang tervalidasi dan terverifikasi guna menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera mengimplementasikan program pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) untuk stunting melalui:
  - a. Pengutamakan kualitas dengan memperhitungkan kebutuhan protein energi rasio yang tinggi sesuai dengan standar keilmuan medis guna mempercepat proses kejar tumbuh anak yang terkena stunting;

- b. Jaminan ketersediaan jumlah PKMK untuk stunting sesuai dengan data kebutuhan melalui pengadaan pemerintah secara tepat waktu baik melalui Program Kementerian Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Nasional untuk memastikan program dapat dilakukan secara berkesinambungan; dan
  - c. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta serta peningkatan komunikasi antar kementerian/lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan program pemberian PKMK di dalam program Kementerian Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilaksanakan.
4. Dalam melaksanakan intervensi spesifik, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
  - a. memastikan penyaluran antropometri terdistribusi ke seluruh Posyandu dan Ultrasonografi terdistribusi ke seluruh Puskesmas;
  - b. melakukan kalibrasi terhadap seluruh instrumen alat ukur stunting agar pendataan yang dilakukan lebih tepat dan sesuai;
  - c. memastikan adanya petunjuk teknis yang terstandar terkait dengan pengukuran indikator stunting; dan
  - d. terus meningkatkan jumlah SDM Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pengukuran antropometri terstandar.
5. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN RI untuk memastikan bahwa petugas lapangan penanganan stunting, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader kesehatan dan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan dari Anggota, termasuk data intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat hari ini paling lambat tanggal 22 Mei 2024.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.13 WIB.

Jakarta, 16 Mei 2024

MENTERI KESEHATAN RI,



Ir. BUDI GUNADI SADIKIN, CHFC, CLU

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



CHARLES HONORIS

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL (BKKBN),



dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)